

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara umum bahasa gender digunakan untuk mendeskripsikan sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi sosial dan budaya. Dalam hal ini mengacu pada suatu karakteristik laki-laki dan perempuan tersebut, yaitu seperti norma, peran, dan hubungan antara kedua kelompok tersebut. Hal ini bervariasi dalam suatu lingkungan, dari masyarakat ke masyarakat dan dapat diubah (World Health Organization, 2017).

Kesetaraan gender merupakan pendorong bagi pembangunan berkelanjutan dalam suatu wilayah maupun negara, ini berhubungan dengan hak asasi manusia yang mendasar agar terciptanya dunia yang sejahtera dan berkelanjutan. Mencapai kesetaraan gender berarti menerapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi antara kedua-belah pihak tersebut yang pada akhirnya memberdayakan perempuan secara ekonomi, sosial dan politik, terutama berperan dan berkontribusi pada pembangunan nasional, baik terhadap lingkup ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tujuannya agar memperoleh kesempatan untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia. Senada dengan penjelasan Hubeis (2010), tidak adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud apabila tidak terdapat diskriminasi antara keduanya untuk mendapatkan partisipasi yang lebih besar pada segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk peran dalam mengawasi pembangunan secara nasional serta penerapan proses pembangunan yang adil dan seimbang.

Ketidaksetaraan gender dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui penurunan kualitas dan kuantitas modal manusia pada suatu negara. Menurunnya kualitas modal manusia sebagai bentuk input produksi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, ketidaksetaraan gender pada salah satu aspek dapat menghambat akses individu terhadap aspek lainnya. Sebagai contoh, diskriminasi gender terhadap akses pendidikan dapat menghambat akses terhadap pekerjaan. Stereotip perempuan untuk mengurus rumah tangga juga menyebabkan perempuan tersebut dapat menghambat dan tidak bisa berkarir dalam dunia pekerjaan, dan sedikitnya peran perempuan dalam tatanan top manajemen perusahaan.

PBB pada September 2015 meluncurkan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama “*Sustainable Development Goals*” (SDGs) yang digunakan untuk menggantikan program sebelumnya “*Millennium Development Goals*” (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs ketika dibentuk memiliki rancangan 17 program dan berlaku untuk semua negara. Isu gender masuk dalam agenda pembangunan tujuan. Tujuan tersebut membahas terkait pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun 2010 UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) mengeluarkan GII (*Gender Inequality Index*). GII merupakan indeks yang menunjukkan derajat ketidaksetaraan gender sebuah negara pada tiga aspek utama; (1) Kesehatan, (2) pemberdayaan, dan (3) ketenagakerjaan. Perancangan GII dimaksudkan agar perkembangan perbaikan kesetaraan gender pada setiap negara bisa diperbandingkan. Indeks GII bernilai 0-1, semakin mendekati 0 maka kesetaraan gender semakin membaik dan kerugian terhadap pembangunan manusia semakin rendah (begitu juga sebaliknya).

Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi cenderung memiliki GII yang rendah. Berdasarkan perhitungan UNDP pada tahun 2015, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang sangat tinggi (*very high human development countries*) secara rata – rata memiliki nilai GII sebesar 0,174, di sisi lain, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development countries*) secara rata – rata memiliki nilai GII sebesar 0,590.

Salah satu aspek penting yang dipengaruhi oleh gender adalah ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat berupa ketidaksetaraan dalam bentuk akses ke pasar tenaga kerja, ketimpangan upah, dan sebagainya. Pada umumnya ketidaksetaraan gender pada aspek tenaga kerja terjadi pada perempuan dibandingkan laki–laki seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor seperti agama, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga (*stereotip*), struktur budaya masyarakat, dan sebagainya.

Sebagai contoh, pada Kawasan regional MENA, perempuan mengalami diskriminasi pada pasar tenaga kerja karena sektor perekonomian bertumpu pada industri minyak dan batu bara. Hal ini dikarenakan minyak dan batu bara secara umum lebih banyak mempekerjakan laki–laki dibandingkan perempuan. Terbatasnya akses perempuan ke pasar tenaga kerja, khususnya pada bidang formal dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya kuantitas dan kualitas input produksi (tenaga kerja) yang seharusnya dapat diperoleh sebuah negara. Salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai indikator kontribusi perempuan terhadap kegiatan ekonomi adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Karena, hal tersebut menggambarkan porsi penduduk sebuah negara yang berusia 15 tahun atau lebih yang secara aktif berkontribusi dalam perekonomian (bekerja maupun mencari pekerjaan).

Populasi dan komposisi penduduk dunia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 total populasi 7,509 Miliar dan komposisi laki-laki sebesar 50,41 persen, sedangkan perempuan sebesar 49,58 persen. Selanjutnya, pada tahun 2018 total populasi meningkat sebesar 7,592 Miliar. Akan tetapi, komposisi antara laki – laki dan perempuan tidak mengalami perubahan (Laporan Bank Dunia, 2019). Jumlah populasi diperkirakan akan terus bertambah pada tahun 2050. Divisi Urusan Sosial dan Ekonomi PBB memperkirakan bahwa populasi dunia saat ini hampir mencapai 7,6 Miliar dan akan terus meningkat hingga 9,8 Miliar pada 2050.

Jika melihat komposisi jumlah penduduk di atas, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir setara. Artinya, pembangunan yang dicapai separuhnya ditentukan oleh perempuan juga. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebuah negara perlu meningkatkan kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas, dan peluang yang sama antara laki – laki dan perempuan. Akan tetapi, hingga saat ini berbagai diskriminasi masih terus dialami oleh perempuan.

ASEAN merupakan salah satu organisasi ekonomi dan politik yang ada pada kawasan EAP dan dibentuk pada tahun 1967. ASEAN yang saat ini terdiri dari sepuluh negara bertumbuh menjadi salah satu kawasan ekonomi terbesar dunia. Pada tahun 2015, perekonomian ASEAN mencapai 2,46 triliun dolar Amerika atau separuh dari perekonomian Jepang. Tiga negara yang memiliki sumbangan paling tinggi terhadap perekonomian ASEAN pada tahun 2015 adalah Indonesia (0,988 triliun), Thailand (0,394 triliun), dan Malaysia (0,330 triliun).

Meskipun memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, namun pembangunan manusia di ASEAN masih terhitung moderat (lihat Tabel 1.1). Apabila melihat ranking indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2015, hanya Brunei yang masuk

kategori *very high human development countries*. Indonesia sebagai negara dengan pangsa PDB paling tinggi di ASEAN masih berada pada kategori *medium human development countries*. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak disertai dengan pembangunan manusia yang tinggi.

Upaya pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat telah mengalami kemajuan. Namun, hasil pembangunan manusia tidak memberikan manfaat yang adil antara laki-laki dan perempuan dan belum cukup efektif dalam meningkatkan pencapaian pembangunan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peningkatan pembangunan manusia di ASEAN tidak selalu meningkatkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. dalam berperan, melakukan kontrol dan menerima manfaat pembangunan di segala bidang kehidupan (Harahap, 2014). Ketimpangan gender dalam hak, sumberdaya, maupun akses politik tidak hanya merugikan perempuan secara umum tetapi juga merugikan anggota masyarakat sekaligus menghambat pembangunan. Investasi yang rendah untuk pendidikan dan kesehatan perempuan akan mengurangi jumlah modal manusia dalam masyarakat dan menurunkan tingkat pendapatan. Rendahnya pendidikan, keterampilan tingkat kesehatan perempuan yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya akan membatasi produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Maka upaya meningkatkan kesetaraan gender merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Dollar dan Gatti (1999), menjelaskan bahwa ketimpangan gender dapat diukur dari kesenjangan pencapaian pendidikan, peningkatan kesehatan dan kegiatan ekonomi (ketenagakerjaan) antara laki-laki dan perempuan. Menurut teori, ketimpangan gender yang tinggi maka pertumbuhan ekonomi rendah dan sebaliknya.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari ASEAN, kenyataan tidak sesuai dengan teori (Tabel 1.1). Permasalahan yang terjadi di ASEAN adalah ketimpangan gender yang tinggi tidak selalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan sebaliknya, tetapi terdapat beberapa negara yang memiliki ketimpangan gender yang tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi juga tinggi.

Apabila dibandingkan dengan nilai GII yang dirilis oleh UNDP, terdapat pola yang sama. Nilai GII negara ASEAN secara umum masih berada pada rata-rata *GII medium human development countries*, sebesar 0,491. Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa meskipun Indonesia memiliki pangsa PDB paling tinggi di ASEAN namun tidak disertai dengan nilai IKG yang rendah. Nilai IKG Indonesia sebesar 0,467 paling tinggi nomor 3 di ASEAN setelah Kamboja (0,479) dan Laos (0,468) yang kontribusinya terhadap PDB ASEAN hanya pada kisaran 0,60 persen.

Namun disisi lain, terdapat negara dengan kontribusi tinggi terhadap PDB ASEAN dan memiliki nilai GII yang rendah. Negara tersebut adalah Malaysia. Pada tahun 2015 nilai IKG Malaysia mencapai 0,291 dan menempati urutan 59 dari 157 negara. Dua hal berbeda yang terjadi di Indonesia dan Malaysia mungkin menunjukkan hubungan yang tidak selaras antara ketidaksetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi.

TABEL 1.1

Perbandingan Tingkat Perekonomian terhadap Tingkat Pembangunan Manusia

| Negara | PDB (Konstan 2010 US\$) (Triliun) | | Nilai IPM/HDI (UNDP) | | IKG/GII (UNDP) | |
|--------|---|------|-------------------------|------|-------------------|------|
| | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indones ia | 0,988 | 1,147 | 0,689 | 0,590 | 0,467 | 0,480 |
| Malays ia | 0,330 | 0,382 | 0,789 | 0,795 | 0,291 | 0,253 |
| Brunei | 0,013 | 0,013 | 0,865 | 0,882 | 0,283 | 0,255 |
| Filipina | 0,279 | 0,340 | 0,682 | 0,587 | 0,436 | 0,430 |
| Thailan d | 0,394 | 0,442 | 0,740 | 0,646 | 0,366 | 0,359 |
| Myanm ar | 0,070 | 0,084 | 0,556 | 0,524 | 0,374 | 0,478 |
| Vietna m | 0,154 | 0,187 | 0,683 | 0,588 | 0,337 | 0,296 |
| Kambo ja | 0,015 | 0,019 | 0,563 | 0,475 | 0,479 | 0,474 |
| Laos | 0,010 | 0,012 | 0,586 | 0,461 | 0,468 | 0,459 |

Sumber: World Bank dan UNDP, 2020.

Berdasarkan laporan progres pemberdayaan perempuan yang dikeluarkan oleh EY pada tahun 2018, kesetaraan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kelembagaan mengalami peningkatan. Namun demikian, hal yang berbeda terjadi pada aspek ketenagakerjaan. TPAK-Perempuan di negara anggota ASEAN tidak seragam. TPAK-perempuan mengalami peningkatan pada negara dengan pangsa pasar yang sedang bertumbuh seperti Filipina.

Apabila Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dibandingkan, maka terlihat bahwa terdapat pola yang sama di Negara Filipina, Thailand, dan Myanmar masing-masing memiliki nilai

Rasio TPAK P/L sebesar 0,62; 0,77; 0,61 menurun tahun 2014. Memang ada penurunan rasio penduduk usia kerja P/L (perempuan atau laki-laki) di masing-masing negara tersebut. Tetapi, hal ini mungkin menunjukkan kurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan pada perekonomian atau terjadi diskriminasi gender pada aspek tersebut.

Hal yang berbeda terjadi di Negara ASEAN lainnya. Rasio TPAK P/L mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018. Namun demikian, rasio penduduk usia kerja P/L justru mengalami penurunan. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan berkurangnya diskriminasi gender dalam aspek tersebut.

TABEL 1.2

Perbandingan Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan terhadap Laki-Laki Negara Berkembang di ASEAN

| Negara | Rasio TPAK P/L | | Rasio Penduduk Usia Kerja P/L | |
|-----------|----------------|------|-------------------------------|------|
| | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 |
| Indonesia | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Malaysia | 0,64 | 0,65 | 0,62 | 0,62 |
| Brunei | 0,78 | 0,81 | 0,61 | 0,59 |
| Filipina | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,58 |
| Thailand | 0,78 | 0,77 | 0,69 | 0,67 |
| Myanmar | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0,60 |
| Vietnam | 0,88 | 0,88 | 0,76 | 0,75 |

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| Kamboja | 0,85 | 0,86 | 0,80 | 0,81 |
| Laos | 0,95 | 0,95 | 0,77 | 0,77 |

Sumber: World Bank dan UNDP 2020.

Apabila melihat struktur tenaga kerja secara sektoral, dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja negara ASEAN berpindah dari sektor pertanian menuju sektor jasa. Pada awal tahun 2000 sektor pertanian masih dominan dalam penyerapan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan untuk negara seperti Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Meskipun demikian trennya terus menurun antara lima hingga dua puluh persen di tahun 2016. Hal tersebut kemudian diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan jasa.

Penyerapan tenaga kerja laki-laki pada tiga sektor utama tersebut secara umum lebih tinggi dibandingkan penyerapan tenaga kerja perempuan. Apabila dilihat dari sisi rasio penyerapan tenaga kerja perempuan terhadap laki-laki, secara umum angka yang diperoleh negara ASEAN masih dibawah angka 1, yang dimana rasio angka 1 menunjukkan ketimpangan gender. Hal yang berbeda terjadi pada negara seperti Filipina yang penyerapan tenaga kerja perempuannya mencapai diatas 1 pada sektor jasa, di sisi lain, pada negara seperti Laos dan Kamboja rasio penyerapan tenaga perempuan di sektor pertanian mencapai diatas 1.

Negara dengan pangsa PDB paling tinggi di ASEAN, memiliki rasio penyerapan tenaga kerja perempuan dibawah 1. Pada sektor pertanian dan industri tren tersebut terus menurun, sedangkan pada sektor jasa tren rasio tersebut terus meningkat. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti tentang pengaruh ketidaksetaraan gender (keterlibatan tenaga kerja perempuan) pada sektor pertanian, industri, dan jasa di ASEAN terhadap PDB negara-negara tersebut.

Kesetaraan gender juga dijelaskan sebagaimana di Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku.”

Makna tersendiri dari ayat tersebut adalah tidak adanya perbedaan antara ciptaan Tuhan yang Maha Esa dari sisi kualitas dan kapasitas, semuanya diciptakan atas hak yang sama. Suhra (2013), menjelaskan dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqûn*), dan untuk mencapai derajat *muttaqûn* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

Sejatinya laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi, dan menerima perjanjian primordial. Perjanjian primordial secara sederhana dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat privat antara sang makhluk dan Khaliknya, antara manusia dengan Tuhannya. Tidak ada pihak lain yang mengintervensi perjanjian itu. Adam dan Hawa juga sama-sama aktif dalam drama kosmis. Makna dari penjelasan drama kosmis itu sendiri adalah laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal dimana mereka mempunyai peran dan hak yang sama atas kehidupan di bumi ini. Implementasi kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an melahirkan adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan. Relasi di bidang

profesi, seperti adanya hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender (Suhra, 2013).

Pentingnya penelitian ini juga diharapkan memberi gambaran kepada siapapun untuk tidak menilai perempuan sebagai *second class citizen*, seperti dilansir oleh (Tribunnews, 2020), dalam masyarakat sendiri, diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi dalam berbagai aspek dan ruang lingkup masyarakat akibat praktik dan budaya patriarki (sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama) yang masih sangat kuat. Praktik ini kerap merugikan kaum perempuan yang seringkali termarginalkan.

Maka dari itu lah, kesetaraan gender sangat diperlukan. Apalagi menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kesetaraan gender dapat memperkuat negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

Salah satu studi terkait hubungan ketidaksetaraan gender dalam aspek tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Klasen dan Lamanna (2009). Studi yang dilakukan Klasen menggunakan data dari 142 negara maju dan berkembang dengan struktur data panel. Periode data penelitian yang digunakan adalah sejak tahun 1960 hingga tahun 2000. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender pada aspek tenaga kerja dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidaksetaraan gender pada aspek tenaga kerja menambah perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar kawasan regional yang diteliti.

Studi kasus yang dilakukan oleh Klasen (2009) kemudian menjadi penelitian acuan yang digunakan untuk melakukan replikasi studi dengan data negara ASEAN periode data tahun 2000-2016. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada penelitian ini adalah penggunaan rasio tenaga kerja yang dibedakan berdasarkan sektor

perekonomian. Sektor perekonomian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga sektor umum (*broad sector*) yaitu pertanian, jasa, dan industri. Rasio tenaga kerja per sektor merupakan rasio tenaga kerja perempuan terhadap laki-laki di setiap sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa.

Berdasarkan pemaparan data terkait kondisi perekonomian dan pembangunan manusia, kondisi partisipasi angkatan kerja perempuan dalam perekonomian, serta penyerapan tenaga kerja sektoral dapat dilihat bahwa terdapat pola yang tidak tepat. Indonesia sebagai negara dengan tingkat kontribusi PDB paling tinggi di ASEAN justru memiliki rasio TPAK P/L paling rendah dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, hubungan antara partisipasi perempuan dalam aspek tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi menarik untuk diteliti dan dilihat dalam aspek sektoral.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh peneliti adalah:

1. Apakah partisipasi perempuan dalam sektor pertanian berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ASEAN?
2. Apakah partisipasi perempuan dalam sektor industri berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ASEAN?
3. Apakah partisipasi perempuan dalam sektor jasa berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan arah hubungan antara partisipasi perempuan dalam aspek ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang di ASEAN. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka juga dapat dijelaskan dibawah ini yaitu:

1. Untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ASEAN.
2. Untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ASEAN.
3. Untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini.

1. Manfaat di bidang teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi perempuan.

2. Manfaat di bidang praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam praktik di dalam dunia pekerjaan bahwasanya partisipasi perempuan adalah salah satu permasalahan yang harus diperhatikan.

3. Manfaat bagi pengambil kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna dalam bagaimana memahami hubungan antara partisipasi perempuan dalam aspek

ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang di ASEAN.